

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N., 2010, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Arief, B. N., 2010, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana. Cet. II*, Mandar Maju, Bandung.
- Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger, W. A., 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan: R.A. Koesnoen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chaerudin, Dinar, A. S., Fadillah, Syarif, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Daliyo, J. B., 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Friedman, L. M., 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- _____, 2001, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnhu Basuki)*, Tata Nusa, Jakarta.
- _____, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, E. O. S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Irianto, Koes, 2013, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, Yrama Widya, Bandung.
- Kanter, E. Y., Sianturi, S. R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukito, Ratna, 2012, *Tradisi Hukum Indonesia*, Institute for Migrant Rights Press, Cianjur.
- Marpaung, Leden, 1991, *Hukuman Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Matalatta, Andi, 1987, “Santunan Bagi Korban” dalam J.E. sahetapy (ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, A. B, 2010, *Demokrasi Konstitusional*, Kompas, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 2000, *Halal Dan Haram*, Bina Ilmu, Surabaya.

- R. M. Suharto., 1991, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasyid, M. Y., 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rifai, Achmad, 2014, *Narkotika Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sasangka, Hari., Rosita, Lily, 2003, *Komentar Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiadi, Edi., Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sianturi, S. R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, & Mammudji, Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suherman, A. M, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisna, I. G. B., 1986, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suyatna, Bagong, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, Prenada Media, Jakarta.

Syahrani, Ridhwaan, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

Yasir, Ahmadi, “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2016.

Cahyo, Dwi, R. P., Adhitama, Satria, “Tinjauan Atas Pengawasan Terhadap Perizinan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Beralkohol”, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.

Huda, Ni'matul, et. al., “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, Januari 2015.

Ketaren, et al., “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No.2, November 2013.

Raharjo, Satjipto, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 1, April 2005.

Supriyanta, "Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan RUU KUHAP", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2010

Usman, Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, Februari 2014.

A. Tesis/Tugas Akhir

Tomi, Muhammad, 2018, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum, Terhadap Pelaku Pelanggaran Penjualan Minuman Keras Di

Kota Sungai Penuh”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi.

Yariandi, Riki, 2017, “Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Miras Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya”, *Tesis*, Program Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Warsita, Iwan Anggoro, 2013, “Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. Internet

Aditya, Ivan, “Pemuda Tewas Usai Pesta Miras”, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/gunungkidul/pemuda-tewas-usai-pesta-miras/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

Janati, Catur Dwi, “Ratusan Botol Minuman Oplosan di Kulonprogo Disita dari Rumah dan Gudang”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/08/23/514/1109650/ratusan-botol-minuman-oplosan-di-kulonprogo-disita-dari-rumah-dan-gudang>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

Prabandari, Ayu Isti, “Pengertian Minuman Keras dan Dampak Kesehatannya, Perlu Diketahui”, <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-minuman-keras-dan-dampak-kesehatannya-perlu-diketahui-klm.html>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

Usman, Arif, “Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi Peredarannya“ *Jurnal Rechtsvinding* Online, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MINUMAN%20BERALKOHOL%20DILARANG%20ATAU%20DIAWASI%20PEREDARANNYA.pdf, diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

Wibowo, Kukuh S, “Korban Miras Oplosan di Bantul Bertambah Jadi 5 Orang Tewas”, <https://travel.tempo.co/read/1607377/di-kampung-seni-yogyakarta-ini-puluhan-siswa-digembleng-menulis-puisi-hingga-naskah-lakon>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 3209*).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168*).

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang
Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan
Minuman Beralkohol.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi
Mutu Produksi Minuman Alkohol.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak
Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman
Oplosan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan
Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian,
Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Pelarangan Minuman Oplosan.



Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Dan Minuman

Oplosan Di Daerah Istimewa Yogyakarta

TRI ROMADHON ASTANU, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul.